



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
**DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI**  
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8 – 9, Jakarta Selatan  
Telepon 021-5224658 Faksimile 021-522503  
www.imigrasi.go.id

Nomor : IMI.2-UM.01.01-3.608 Jakarta, 05 Juni 2013  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pemberlakuan Paspor Baru tanpa tanda tangan Pejabat Yang Mengeluarkan**

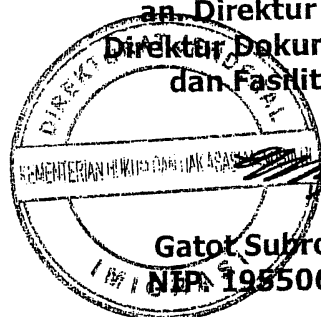
Yth. **Kepala Kantor Imigrasi**  
di-  
Seluruh Indonesia

Sehubungan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Spesifikasi Teknis Pengamanan Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat perubahan desain pada halaman 3 (tiga) blanko paspor RI yang semula berupa teks "Tanda Tangan Pemegang/*Signature of Bearer*, Pejabat yang mengeluarkan/*Issuing Authority*, Tanda Tangan/*Signature*" dirubah menjadi teks ""Tanda Tangan Pemegang/*Signature of Bearer*";
2. Bahwa dengan adanya perubahan tersebut di atas maka tidak diperlukan lagi tanda tangan Kepala Kantor maupun Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan tanda tangan pada halaman 3 Paspor RI;
3. Bahwa pemberian/pemberlakuan paspor "tanpa tanda tangan Pejabat yang mengeluarkan" baru dapat dilaksanakan apabila persediaan blanko paspor dengan desain lama telah habis dipergunakan;
4. Bahwa pemberian/pemberlakuan paspor "tanpa tanda tangan Pejabat yang mengeluarkan" agar dilaporkan kepada Direktur Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**an, Direktur Jenderal Imigrasi**  
**Direktur Dokumen Perjalanan, Visa**  
**dan Fasilitas Keimigrasian**



**Gatot Subroto, SH., MH., MM**  
**NIP. 19550618 198103 1 001**

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Imigrasi (sebagai laporan);
2. Setditjenim dan Para Direktur di Lingkungan Ditjen Imigrasi;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI di seluruh Indonesia.